

## NTB Satu Data, Data Sektoral yang Tervalidasi



<https://aptika.kominfo.go.id/>

**Mataram, Incinews.net-** Sebagai wali data dalam program NTB Satu Data, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB memiliki tugas yang menantang, yaitu memvalidasi data sektoral dari seluruh OPD Provinsi NTB. Data Sektoral yang dihasilkan oleh OPD merupakan basis data untuk dapat menentukan kebijakan. Data yang valid akan menghasilkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat.

Data yang tidak valid akan menyebabkan lemahnya perencanaan dan implementasi program pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.H., M.H dalam Rapat Forum Data Statistik Sektoral yang bertajuk “Satu Data NTB Gemilang” yang diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Kominfo NTB, Kamis (30/01/2020) Rapat yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah ini bertujuan agar OPD dapat menghasilkan data sektoral yang valid, tersinkronisasi dengan data dari kab/kota serta dengan data pemerintah pusat.

“Data merupakan kebutuhan dasar ketika kita mengeksekusi program. Jika kita ingin membuat program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, yang pertama harus diperbaiki adalah data statis sektoral dari semua OPD”, ujar Kadis Kominfo ini. Dijelaskan lebih lanjut bahwa agar dapat merancang program yang mumpuni dan merakyat, maka data di NTB SATU DATA, harus “Intinya, data dan informasi adalah basis. Tidak ada gunanya banyak data jika tidak bisa digunakan”, ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Kabag Pemberitaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB ini mengutip ucapan Presiden Joko Widodo terkait data. Dikatakannya bahwa kelemahan/kekalahan kita dengan negara lain adalah pada data. Untuk satu permasalahan seperti kemiskinan, terdapat banyak data yang disodorkan dari berbagai instansi dengan angka yang berbeda-beda sehingga sulit untuk memutuskan data mana yang akan digunakan.

“Persoalan data yang kita hadapi adalah masalah validasi, bagaimana kita bisa menyatakan suatu data itu akurat. Selain itu, timeline ketika mem-publish data juga harus tepat”, tegas mantan Irbansus Inspektorat NTB ini.

Dikatakannya, bahwa seringkali kuantitas data yang dimiliki tidak berkaitan dengan problem yang dihadapi. “Bisa dikatakan sebagai data sampah. Untuk itu, kita diberikan direktif dari pimpinan bahwa data yang kita butuhkan adalah data terkini, yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, “ tegas pria yang ramah ini.

Sementara itu, Kepala BPS NTB Suntono, S.E., M.Si mengungkapkan bahwa data menjadi suatu kekayaan baru yang dapat mempengaruhi berbagai aspek. “Data yang baik dan berkualitas akan menjadikan perencanaan tepat sasaran yang artinya tidak memboroskan anggaran negara” jelasnya.

BPS NTB telah menyiapkan sebuah sistem yang dapat diintegrasikan dengan NTB Satu Data. Sistem tersebut diberi nama RUDATS atau Rumah Data Statistik Sektoral. Rudats terinspirasi oleh publikasi kita yang seringkali tidak sesuai dengan data dari masing – masing level pemerintahan, misalnya data provinsi mengenai data jumlah siswa atau pendidikannya, seringkali datanya berbeda dengan data NT dalam angka.

“Kalau di BPS menggunakan *one gates system*, jadi pintu data itu cukup satu, sehingga tidak ada bidang lain yang mengeluarkan data” jelasnya. (Inc)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.incinews.net/2020/01/ntb-satu-data-data-sektoral-yang.html>
2. <https://www.suarakonsumenindonesia.com/2020/01/ntb-satu-data-data-sektoral-yang.html>
3. <https://hariannusa.com/2020/01/31/ntb-satu-data-data-sektoral-yang-tervalidasi-menentukan-kebijakan-yang-tepat/>

#### **Catatan:**

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.<sup>1</sup>

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.<sup>2</sup>

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

1. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan 11 Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

2. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
4. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dilaksanakan oleh:

1. Dewan Pengarah;
2. Pembina Data tingkat pusat;
3. Walidata tingkat pusat; dan
4. Produsen Data tingkat pusat<sup>4</sup>

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota.<sup>5</sup>

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh:

1. Pembina Data tingkat daerah;
2. Walidata tingkat daerah;
3. Walidata pendukung; dan
4. Produsen Data tingkat daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

<sup>4</sup> Pasal 11, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

<sup>5</sup> Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

<sup>6</sup> Pasal 19, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia